

Peran Pendamping PKH dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Dompu

Arif Bulan^{1*}, Ilham²

^{1,2}STKIP Yapis Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Correspondence Author Email: arifbulan1@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengenai peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Dompu sangat perlu untuk dilakukan, mengingat ini adalah suatu fenomena yang perlu diungkap. Selain itu, stunting merupakan isu yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Dompu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah dua orang yang dipilih menggunakan teknik purposive. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mencari pola peran yang muncul dari data wawancara yang dicari dan didapatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting adalah peran edukatif, peran fasilitatif dan peran teknis. Peran edukatif berkaitan dengan peran pembinaan dan pemberian materi stunting pada KPM PKH. Sementara, peran fasilitatif berkenaan dengan fasilitasi pencairan bansos dan penggunaan bansos untuk keperluan keluarga. Sedangkan peran teknis adalah berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan menggunakan teknologi.

Kata Kunci: Stunting, PKH, Peran Pendamping.

Abstract

Research regarding the role of PKH assistants in efforts to prevent stunting in Dompu Regency is very necessary, considering that this is a phenomenon that needs to be uncovered. Apart from that, stunting is a very interesting issue to research. This research aims to find out what role PKH facilitators play in efforts to prevent stunting in Dompu Regency. The research method used in this research is qualitative research with descriptive qualitative analysis. The number of informants in this research were two people selected using purposive techniques. The data analysis used in this research is qualitative analysis which looks for role patterns that emerge from the interview data sought and obtained. The results of this research show that there are three roles of assistance role of PKH in stunting prevention efforts, namely the educational role, the facilitative role and the technical role. The educational role is related to the role of coaching and providing stunting material to PKH members. Meanwhile, the facilitative role is related to facilitating the disbursement of social assistance and the use of social assistance for family needs. Meanwhile, the technical role is related to the ability to communicate and use technology.

Keywords: Stunting, PKH, Assistance Role

Article History:

Submitted: 7 Desember 2023

Revised: 8 Desember 2023

Accepted: 8 Desember 2023

PENDAHULUAN

Stunting saat ini menjadi masalah bagi bangsa Indonesia (Makripuddin, Roswandi, & Tazir, 2021). Bahkan, Negara melalui presiden menyatakan stunting sebagai prioritas program serta penanganannya. Dengan demikian stunting menjadi konsen utama bagi negara. Intervensi program pemerintah sangat diharapkan dalam penanganan stunting, karena dengan begitu stunting dapat diatasi (Nadilla, Nurwati, & Santoso, 2022). Namun kenyataannya angka stunting masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan (42,1%) dibandingkan dengan daerah perkotaan (32,5%) (Nisa, 2018).

Stunting itu adalah di mana tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017). Penyebab stunting terdiri dari banyak faktor yang saling berpengaruh satu sama lain dan penyebabnya berbeda disetiap daerah. Penyebab stunting secara langsung *meliputi* asupan nutrisi tidak adekuat dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung stunting dapat disebabkan oleh faktor ketahanan pangan keluarga, pola asuh, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang tidak memadai mencakup air dan sanitasi. Penyebab dasar terjadinya stunting dihubungkan dengan pendidikan, kemiskinan, sosial budaya, kebijakan pemerintah dan politik (Olo, Medani, & Rakhmawati, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis kementerian Kesehatan pada tahun 2021 ini, bayi lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Banyak dari mereka yang lahir normal, tapi pada perkembangannya mengalami stunting, sehingga mencapai 27,6%. Dengan demikian, angka 23% itu muncul dari proses kelahiran yang sudah tidak sesuai standar. Selain itu, sebanyak 11,7% bayi yang mengalami stunting karena terlahir dengan gizi yang kurang atau buruk seperti panjang tubuh bayi yang mencapai 48 sentimeter dan berat badannya tidak mencapai 2,5 kilogram (Hidayat et al., 2021).

Pendekatan multi-sektor juga terus dilakukan melalui program gizi sensitif yang dilaksanakan secara simultan termasuk pembelajaran dari berbagai program sebelumnya yang sangat berhasil seperti Posyandu, PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM, Pamsimas. Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki komponen, kesehatan (ibu hamil dan balita), pendidikan (anak usia sekolah) dan kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia) (Kementerian Sosial, 2018). Dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM (Keluarga Sangat Miskin) di Indonesia kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM. Secara statistik, program PKH telah menunjukkan keberhasilan. BPS (2017) mencatat bahwa sejak Program PKH diluncurkan telah

terjadi penurunan angka kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 (Susridawati & Ali, 2023).

. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa salah satu program yang dapat menekan angka stunting adalah program keluarga harapan (PKH). PKH memiliki tenaga lapangan yang disebut pendamping PKH. Mereka bertugas di lapangan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Salah satu peran pendamping PKH adalah mendampingi para penerima manfaat PKH yang disebut keluarga penerima manfaat (KPM PKH).

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para keluarga penerima manfaat, PKH memiliki program yaitu *Family Development Session* (FDS) atau disebut juga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 adalah kegiatan wajib untuk diikuti seluruh penerima bantuan sosial PKH. Dalam P2K2, mereka mendapatkan berbagai materi edukatif, mulai dari pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan keluarga, sampai pengasuhan anak dan pendidikan. Diharapkan, dengan P2K2, keluarga penerima manfaat dapat belajar dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh pendamping secara terstruktur dan dapat memperkuat perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pendamping PKH harus dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada para KPM baik dari segi materi ataupun psikologis agar masyarakat khususnya KPM merasa bahwa mereka memiliki tempat untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya termasuk permasalahan anak stunting yang dialami oleh orang tua berasal dari keluarga penerima manfaat. Pendamping PKH bertugas menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas sering terjadi keadaan yang dilematis bagi para pendamping. Kadang program yang akan atau sedang berlangsung dilapangan tidak sesuai atau berbeda dengan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Sehingga kompleksitas lapangan menuntut pendamping untuk bertindak arif dan sabar. Peran pendamping dalam pelaksanaan PKH tidak hanya sebagai atribut yang serba bisa, namun dituntut sebagai penyeimbang dan pendengar suara masyarakat kecil (Susridawati & Ali, 2023).

Dengan demikian, sangat penting kiranya untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam penanganan stunting. Namun harus diketahui bahwa peran merupakan suatu sikap atau sebuah perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sebuah kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki sebuah status atau kedudukan tertentu. Dapat pula diartikan bahwa suatu peran merupakan sebuah tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh sebuah masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan (Rahmawati, Sukapti, & Abdullah, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian yaitu apa saja peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Dompu. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui apa saja peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Dompu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting. Sugiyono (2018) mengungkapkan bahwa Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia dengan cara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan non-angka, yang melibatkan interpretasi makna dan konteks dari informasi yang diperoleh.

Penelitian tentang peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Dompu berusaha untuk mendeskripsikan fenomena peran pendamping PKH di lapangan dalam upaya pencegahan stunting. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup cerita yang memberikan konteks dan pemahaman yang lebih baik dalam penanganan stunting tersebut.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara. Adapun wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, di mana instrumen sudah disiapkan dan digunakan sesuai dengan pertanyaan yang telah dikembangkan. Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diajukan kepada responden. Wawancara ini memiliki kerangka atau struktur pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang konsisten dan dapat dibandingkan antar responden (Creswell, 2014).

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mencari pola peran yang muncul dari data wawancara yang dicari dan didapatkan. Analisis kualitatif adalah proses sistematis untuk memahami, menginterpretasi, dan memberikan makna pada data yang diperoleh (Creswell, 2014). Analisis ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari data wawancara dengan pendamping sosial PKH. Adapun pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis naratif di mana menganalisis struktur naratif dan pola cerita dalam data wawancara.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994). Model ini peneliti adopsi pada empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pada setiap tahap tersebut di atas dilakukan dengan cermat berdasarkan data yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari wawancara yang dilakukan kepada dua pendamping sosial PKH Kabupaten Dompu, ditemukan beberapa fakta menarik mengenai peran pendamping sosial PKH dalam upaya penanganan stunting. Hasil olahan data, terdapat tiga data yang ditemukan yaitu peran edukatif, peran fasilitatif dan peran teknis. Peran-peran ini akan dijabarkan secara deskriptif di bawah ini sesuai dengan fakta lapangan.

Peran Edukatif Pendamping PKH dalam Upaya Pencegahan stunting

.Berdasarkan hasil wawancara dengan responden satu dan dua, terdapat informasi atau data bahwa pendamping PKH ditugaskan untuk melakukan kegiatan wajib berupa pertemuan peningkatan kesejahteraan keluarga (P2K2). Sebelum melakukan P2K2 terlebih dahulu pendamping mendapatkan pelatihan. Sehingga pendamping PKH memiliki pengetahuan terkait materi-materi yang tertuang dalam modul yang akan disampaikan kepada KPM.

Ada beberapa modul yang wajib disampaikan kepada KPM PKH di antaranya modul kesejahteraan sosial, pendidikan dan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, modul ekonomi, dan modul kesehatan dan gizi. Pada modul kesehatan dan gizi inilah terselip materi tentang stunting, karena padainti modul ini yaitu menekankan pada stunting baik itu pencegahan maupun penanganannya. Berdasarkan pada juknis PKH bahwa memang pendamping PKH wajib melakukan P2K2.

Pendamping PKH memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada KPM PKH. Hal ini tertuang dalam tugas dan fungsi pokok pendamping PKH. Menurut Susridawati & Ali (2023) pendamping PKH wajib memainkan perannya sebagai pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data yang didapatkan sebenarnya pendamping PKH hanya pada tataran pencegahan. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan cara memberi edukasi, maka dari itulah pendamping PKH memiliki peran edukatif.

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pendamping PKH dalam penguatan perannya yaitu dengan memberikan edukasi yang maksimal kepada KPM. Wadah edukasi yang dilakukan oleh pendamping adalah melalui P2K2 di mana setiap KPM PKH wajib hadir dalam pertemuan rutin tersebut. Pertemuannya dilakukan setiap bulan pada setiap kelompok PKH. Setiap kelompok berisi maksimal 20 KPM biasanya yang tersebar pada setiap dusun di desa masing-masing.

Peran Fasilitatif Pendamping PKH dalam Upaya Pencegahan stunting

.Berdasarkan hasil wawancara dengan responden satu dan dua. Bahwa pendamping PKH menjadi fasilitator terhadap setiap program kementerian sosial. Program utama kementerian sosial adalah memberikan bantuan sosial berupauang tunai. Uang itu diberikan kepada KPM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos).

Ada beberapa kriteria KPM yang boleh mendapatkan bansos pertama ibu hamil dan menyusui, kedua, balita, ketiga anak sekolah, keempat disabilitas, kelima lansia. Dengan banyaknya program tersebut, hanya satu program yang sejalan dengan stunting yaitu program fasilitasi untuk KPM dalam mendapatkan bansos. Menurut Nadilla et al., (2022) Bansos yang diberikan kepada KPM tidak Cuma-Cuma, namun bersyarat. Adapun syaratnya yaitu wajib mengikuti P2K2. Dengan P2K2 itulah diberikan atau diajari modul kesehatan dan gizi, yang mana modul itu erat kaitanya dengan materi stunting.

Pendamping PKH memiliki peran untuk memastikan bahwa KPM mendapatkan bansos kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang menopang, salah satunya, upaya pencegahan stunting di Kabupaten Dompu. Fasilitasi ini erat kaitannya dengan intervensi pendidikan, di mana KPM diberikan pendidikan tentang bagaimana mencegah dan menangani stunting mulai dari keluarga.

Fasilitasi penanganan stunting memang harus melibatkan banyak sektor di antaranya sektor (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018). Ungkapan ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa pencegahan dan penanganan stunting harus melibatkan multi sektor dan multi pendekatan. Pendekatan yang dilakukan pendamping PKH ini erat kaitannya dengan pendekatan atau peran edukatif dan fasilitatif. Dengan demikian, fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping PKH kabupaten Dompu yaitu pertemuan rutin dan aduan KPM. Hal itu senada seperti yang disampaikan oleh Rahmawati et al., (2023) bahwa Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh pendamping dengan memberikan penuh arahan dan juga memfasilitasi apabila ada yang terkandala masing-masing kegiatan tersebut. Selain itu, berperan sebagai kemungkinan dalam membantu keluarga dengan sangat solutif dan rendah hati. Sebagaimana dari data temuan peneliti, dari ketiga keluarga menyampaikan kalau sebagai seorang pendamping PKH melakukan tugasnya dengan sangat baik kepada KPM, selalu membantu KPM dengan cepat dan responsif apabila ada yang mengalami kendala saat pencairan dana.

Peran Teknis Pendamping PKH dalam Upaya Pencegahan stunting

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden satu dan dua bahwa pendamping PKH memainkan peranan teknis dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten Dompu. Adapun Peran teknis tersebut adalah kemampuan beretorika sehingga dalam menjalankan perannya sangat terbantu. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Haryani, Astuti, & Sari, (2021) bahwa beretorika atau berkomunikasi dengan baik merupakan kemampuan teknis yang mendukung peran lainnya.

Selain itu, pendamping PKH harus mampu mengoperasikan computer sebagai peran teknis di mana hal ini sangat senada dengan perkembangan jaman. Lagipula, pendamping PKH juga harus melek teknologi hal itu berkenaan dengan peran dan fungsinya di masyarakat. Sebagai pekerja sosial kemampuan teknologi sangat perlu,

hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sutarno, (2017) bahwa teknologi dapat membantu pekerjaan.

Di PKH ada yang namanya media pembelajaran. Media ini digunakan untuk membantu proses edukasi penanganan stunting. Media ini berupa poster dan kartu yang sudah dipersiapkan oleh kementerian untuk para pendamping PKH. Namun juga kementerian menganjurkan untuk menggunakan media lain berbasis teknologi misalnya laptop serta proyektor saat memberikan edukasi kepada KPM PKH. Inilah peran teknis yang juga penting dalam menunjang peran edukatif dan fasilitatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pendamping PKH dalam upaya pencegahan stunting adalah melalui peran edukatif, peran fasilitatif, dan peran teknis. Peran edukasi dilakukan dengan cara pemberian materi terkait stunting, kemudian peran fasilitatif dilakukan dengan memfasilitasi pencairan bansos untuk keperluan pencegahan stunting, sedangkan peran teknis berkaitan dengan kemampuan lain yang mendukung peran edukatif dan fasilitatif. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu lakukanlah pengabdian kepada masyarakat (PKM) mengenai Pendampingan dan Edukasi KPM PKH dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, untuk penelitian lanjutan sangat disarankan untuk meneliti tentang model pencegahan dan penanganan stunting multisektor di Kabupaten Dompu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. England: Pearson Education Limited.
- Haryani, S., Astuti, A. P., & Sari, K. (2021). Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 4(1), 30–39.
- Hidayat, M. N. F., Rahman, H. F., Faisol Mustaqim, M. A., Latif, F. A., Ali Multazam, D. Q., & Adiwirawan, A. S. (2021). PKM Peningkatan Pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tentang Stunting Di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 2(3), 861–874.
<https://doi.org/10.33650/guyub.v2i3.2923>
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting. In *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). Panduan Fasilitasi : Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa. In *Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Makripuddin, L., Roswandi, D. A., & Tazir, F. T. (2021). *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook*. Thousand Oaks, California: Sage Publications Ltd.

Nadilla, H. F., Nurwati, N., & Santoso, M. B. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 17–26.
<https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39561>

Nisa, L. S. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.

Olo, A., Medani, H. S., & Rakhmawati, W. (2021). Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1113–1126.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.521>

Rahmawati, M., Sukapti, & Abdullah, Z. (2023). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Fasilitator di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *EJournal Pembangunan Sosial*, 11(1), 244–260.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Susridawati, R., & Ali, H. (2023). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 237–248.

Sutarno. (2017). *Media Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Teknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.